

**PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ISELUMA
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

Jl. R.A Kartini Pematang Aur 38576 SELUMA – BENGKULU
e-mail : perkimseluma@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN SELUMA**

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
SELUMA TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Kerja Perangkat Daerah;

- c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
- d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- f. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAIS
 PADA TANGGAL : 2025

Kepala Dinas



ERLAN SUADI, SP., M.AP
 NIP. 19711119 200604 1 010

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Seluma
Nomor : Tahun 2025
Tanggal: 2025

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
SELUMA TAHUN 2025**

NO.	NAMA/NIP.	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan Dalam TIM
1.	Erlan Suadi, SP., M. AP. NIP. 197111192006041010	Kepala Dinas	Ketua
2.	Adiman, SH,MM NIP. 196708031995031001	Sekretaris	Sekretaris
	Pokja Sekretariat		
3.	Widia Natalia, SE Nip. 198312252007012005	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Ketua Pokja
4.	Hendra Kusuma, SKM,MPH Nip. 197611231996021004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pokja Perumahan		
5.	Azfit Ariyanto, ST Nip. 198207252010011004	Kabid Perumahan	Ketua Pokja
6.	Nazarudin,ST Nip. 197702162009021002	tehnik tata bangunan dan perumahan	Anggota
7.	Febrian, SKM Nip. 197902132006041008	tehnik tata bangunan dan perumahan	Anggota
8.	Jazz martan,ST Nip. 198112062010011007	Analisis Perumahan	Anggota
9.	Mulyadi, ST Nip. 19800952008041001	Analisis Perumahan	Anggota
	Pokja Kawasan permukiman		
10.	Jeffy romadhoni, M. Si Nip. 198306122008041001	Kabid Kawasan Permukiman	Ketua Pokja
11.	ISKANDAR, S.Sos Nip. 197904052007011021	Kasi Pertanahan	Anggota
	Pokja Perhubungan		
12.	Diosi sapta putra,S.Pd Nip. 197106011998031006	Kabid perhubungan	Ketua Pokja
13.	Susianti, S.E. Nip. 197709192011012001	Kasubbag Tu UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota

14.	Dian ariandi, S.Kom Nip. 198006202006041013	Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Anggota
17	Meri Heryuti, SIP 198005202006041011	Kasi Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan.	Anggota
15.	Herman yulianto Nip. 19700901199703	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota
16.	Abdul azis,A.Md Nip. 198406092011011001	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota

Kepala Dinas



ERLAN SUADI, SP., M.AP
NIP. 19711119 200604 1 010

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis, sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Seluma. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma. Terkait dengan masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, maka Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2025-2029.

Besar harapan kami semoga Rancangan Akhir Renstra Dinas ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dalam melaksanakan Program-program Perangkat Daerah.

Tais, Oktober 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan



ERLAN SUADI, SP., M.AP
NIP. 19711119 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	12
1.3. Maksud dan Tujuan.....	14
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB III	48
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Tahun 2025-2029	48
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Tahun 2025-2029	48
3.3 Strategi Perangkat Daerah	53
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	53
BAB IV	56
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1. Uraian Program	56
4.2. Uraian Kegiatan	61
4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	77
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah	104
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).	108
4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indicator Kinerja Kunci (IKK)	111
BAB V PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....	31
Tabel 2.1. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 2.1. 3	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan	32
Tabel 2.1. 4	pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dinas perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan kabupaten seluma	35
Tabel 2.1. 5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024 ...	36
Tabel 2.2. 1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Seluma	39
Tabel 2. 1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	47
Tabel 3. 3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Seluma	49
Tabel 3. 4	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Seluma	54
Tabel 4. 1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma	57
Tabel 4. 2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Seluma	62
Tabel 4. 3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seluma.....	78
Tabel 4. 4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Seluma.....	104
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Seluma	109
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Seluma	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, atau dahulu disebut dengan Ranwal Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, berisikan tujuan, sasaran, pogram, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah juga memuat penetapan target pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dengan menyelaraskannya pada pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya, Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Pasal 273 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014).

Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Rancangan Akhir Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang diwaktu kedepan. Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode Renstra pada Tahun 2029, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur

keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2029.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 berpegang pada visi dan misi Bupati Seluma, untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut maka perlunya dukungan perangkat daerah dalam bentuk program kerja yang telah di sinkronkan dengan isu-isu strategis yang terjadi. Adapun visi dari Bupati Seluma yaitu **“Seluma EMAS BERLIAN (ELOK, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN BERIMAN)”**.

Rancangan Akhir Renstra Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma selama 5 tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya. Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam penyusunannya berkaitan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya. Rancangan Akhir Renstra PD dan dokumen perencanaan penjabarannya hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Perhubungan

Dokumen ini menjadi acuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam mengambil kebijakan yang harus diambil daerah yang bersal dari rencana strategis nasional.

3. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu menjadi acuan dalam penyelarasan kebijakan, program kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan di Provinsi Bengkulu.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma
Dokumen RPJPD diturunkan kedalam RPJMD dengan penyelarasan arah kebijakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.
Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Dengan demikian Rancangan Akhir Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 12) Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 13) Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- 14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 15) Peraturan Daerah (perda) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.
- 16) Peraturan Daerah (perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043.
- 17) Peraturan Daerah (perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Startegis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan pertanahan dan urusan perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2025-2029 ini yaitu :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara

sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;

2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
4. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun

2025-2029

- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program Perangkat Daerah
- 4.2. Uraian Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma mempunyai:

a. Tugas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan pelaksanaan teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman serta perhubungan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan;
- 3) Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi tata ruang perumahan dan kawasan permukiman, jasa konstruksi serta bidang perhubungan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi, pembinaan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, jasa konstruksi dan perhubungan;
- 5) Pelaksanaan pembangunan dan pengorganisasian pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dasar di perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan.

c. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Bidang Perumahan yang terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Perumahan; dan
 - b) Seksi Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Perumahan.
- 4) Bidang Kawasan Permukiman, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
- 5) Bidang Perhubungan, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - b) Seksi Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan.
- 6) Unit Pelaksana Teknis (Balai Uji Kendaraan Bermotor), dan
- 7) Jabatan Fungsional.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan.
- b) Melaksanakan penyusunan renstra SKPD, Renja Perubahan SKPD, RKA, DPA dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c) Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Restra, Renja Perubahan dan RKA dari bidang;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset;
- e) Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas;
- f) Mengkoordinasikan Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- g) Menyampaikan laporan mutasi barang, laporan triwulan, laporan tahunan, kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD terkait;

- h) Membuat rencana kebutuhan barang, pengadaan barang, dan pendistribusian barang di lingkungan dinas;
- i) Membuat usulan penghapusan barang/inventaris Dinas melalui SKPD terkait;
- j) Melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan guna menunjang kerja Dinas dan peningkatan pelayanan publik;
- k) Pelaksanaan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- l) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, profil dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dinas;
- m) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- n) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja subbagian;
- b) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan dinas;
- c) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan prasarana dan sarana;
- d) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi prasarana sarana dinas serta aset lainnya;
- e) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana sarana dinas dan aset lainnya;
- f) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan sekretariat;
- h) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian
- i) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, dan cuti pegawai serta pemberian penghargaan;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urutan kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;

- k) Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m) Melaksanakan analisis jabatan dan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n) Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pengelolaan aset, tata naskah dinas, arsip dan dokumentasi serta keprotokoliran.
- o) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- p) Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan anggaran dengan bidang, sub bagian lain dan pihak terkait untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas, Renja Perubahan SKPD, RKA dan DPA;
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, profil dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dinas;
- d) Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan;
- e) Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan;
- f) Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- g) Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- j) Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan dan tahunan;
- k) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan di lingkungan bagian Sekretariat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4) Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan kegiatan pendataan perumahan, perencanaan dan penyediaan perumahan, penataan perumahan serta pengawasan dan evaluasi perumahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundangan tentang perumahan;
- c) Menyusun renstra, Renja Perubahan, RKA, profil dan LAKIP bidang berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan dalam penyusunan perencanaan perumahan;
- e) Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang perumahan;
- f) Melaksanakan kegiatan pendataan, perencanaan penyediaan, penataan pembangunan di bidang perumahan;
- g) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi perumahan;
- h) Melaksanakan administrasi kegiatan pengelolaan pembangunan perumahan;
- i) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait dalam bidang perumahan;
- j) Melaporkan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- k) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Perumahan

Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendataan, Perencanaan dan Penyediaan Perumahan;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang tugas;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pembangunan perumahan dengan dinas terkait/lembaga/badan usaha di bidang pengembangan perumahan;

- e) Melaksanakan pengawasan program dan kegiatan pendataan, perencanaan dan penyediaan perumahan;
- f) Melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyediaan perumahan serta pelayanan informasi perumahan;
- g) Melaksanakan kompilasi data, analisa, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan seksi;
- h) Melaksanakan pemeriksaan terhadap perencanaan fisik bangunan dan perencanaan penggunaannya;
- i) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- j) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

6) Seksi Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Perumahan

Seksi Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Perumahan;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang tugas;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penataan, pengawasan dan evaluasi perumahan dengan lembaga/badan usaha / SKPD terkait;
- e) Melaksanakan pengawasan program dan kegiatan penataan, pengawasan dan evaluasi perumahan;
- f) Melaksanakan pelayanan, penataan, pengawasan dan evaluasi perumahan;
- g) Melaksanakan administrasi penataan, pengawasan dan evaluasi perumahan;
- h) Melaksanakan penataan terhadap pembangunan dan penempatan perumahan;
- i) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- j) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan

- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7) Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan permukiman, perencanaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Permukiman;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang tugasnya;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP bidang berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan dalam penyusunan perencanaan dan pemanfaatan kawasan permukiman;
- e) Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang kawasan permukiman;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Instansi terkait dalam bidang kawasan permukiman;
- h) Melaksanakan kegiatan perencanaan untuk pembangunan, rehabilitasi prasarana di bidang kawasan permukiman;
- i) Melaksanakan pendataan, perencanaan, peningkatan kualitas, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- k) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Seksi Pendataan, Perencanaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang

tugasnya;

- c) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- d) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak terkait;Menyiapkan data sebagai penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kawasan permukiman;
- e) Menghimpun dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan perencanaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- f) Melakukan pendataan potensi, kendala dan hasil kerja program dan kegiatan seksi;
- g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugas;
- h) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pendataan, perencanaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- i) Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman;
- j) Menghimpun dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan penataan dan pengendalian pemakaman umum;
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai nahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- l) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang tugasnya;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Menyusun pedoman teknis pelaksanaaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e) Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi atau

lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f) Mengumpulkan dan menyusun database pemanfaatan dan pengendalian untuk tersedianya data yang berkesinambungan guna pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pada masa yang akan datang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g) Mengatur dan meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman untuk mengetahui tingkat pemenuhan atas prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h) Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan tindak lanjut pelaksanaannya;
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- k) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10) Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas mengelola urusan lalu lintas dan angkutan, melakukan urusan teknis di bidang Perhubungan, prasarana dan pengujian kendaraan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perhubungan, mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang perhubungan;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP bidang berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perhubungan;
- e) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang;
- f) Mengelola perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;

- g) Mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- h) Mengelola pengendalian pelayanan umum di bidang perhubungan;
- i) Mengelola kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- j) Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang perhubungan;
- k) Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai menjalankan tugas/penugasan;
- l) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan;
- m) Melaporkan pelaksanaantugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- n) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o) Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang tugasnya;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- d) Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi usaha angkutan serta mengusulkan penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
- f) Membina, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan rekomendasi bongkar muat barang di jalan;
- g) Melaksanakan pemungutan retribusi, menetapkan rekomendasi dan bongkar muat;
- h) Menyusun jaringan trayek angkutan pedesaan, baik rute, jumlah dan jenis kendaraan dan menentukan jaringan lintas untuk angkutan barang;
- i) Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi analisa dampak lingkungan terhadap lalu lintas dan angkutan;

- j) Menyusun kebutuhan pengadaan dan pembangunan serta pemeliharaan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan angkutan;
- k) Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kemampuan petugas lalu lintas dan angkutan;
- l) Mengarahkan kegiatan lalu lintas dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m) Mendesain strategi peran serta masyarakat dalam mendukung Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
- n) Mengelola kegiatan survey lapangan dan pendataan dalam rangka memperoleh informasi guna penyusunan program kerja bidang lalu lintas dan angkutan;
- o) Mengelola perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan penerangan jalan lainnya;
- p) Menyusun rencana umum jaringan transportasi sekunder dan kelas jalan;
- q) Melaksanakan penentuan titik simpul pada prasarana dan sarana perhubungan seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, simpang dan terminal;
- r) Menyusun dan menetapkan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- s) Melakukan analisa dampak lalu lintas terhadap aktifitas pembangunan dan melakukan pendataan, analisa dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- t) Menyiapkan penetapan lokasi dan desain terminal serta menyusun jaringan trayek angkutan pedesaan, baik rute, jumlah dan jenis kendaraan;
- u) Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai kerusakan dan pelayanan penerangan jalan umum;
- v) Mengupayakan pemecahan masalah teknis terhadap kejadian-kejadian dan fungsi penerangan jalan umum yang mengalami gangguan/kerusakan;
- w) Melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan dan melaksanakan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang berupa kelengkapan buku KIR, Surat Izin Bongkar Muat dan Trayek (Kartu Pengawasan);
- x) Melakukan penilangan terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas dan peraturan daerah dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
- y) Mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja terkait dalam rangka pengamanan

berkendaraan terhadap para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta melaksanakan pengawalan para Pejabat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;

- z) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- aa) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- bb) Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan terminal dan pengelolaan parkir; serta melaksanakan pembinaan dan pengelolaan terminal;
- cc) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
- dd) Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.

12) Seksi Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan

Seksi Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan;
- b) Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait bidang tugasnya;
- c) Melaksanakan penyusunan draf usul Renstra, Renja Perubahan, RKA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak terkait;
- d) Menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengelolaan serta pemberian perizinan pendidikan mengemudi;
- e) Mengelola pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pengujian kendaraan;
- f) Membina dan mengesahkan hasil uji dan pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- g) Melaksanakan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak bermotor;
- h) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta serta akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
- i) Melaksanakan penilaian teknis kendaraan bermotor;
- j) Menyediakan dan memelihara prasarana pengujian kendaraan;
- k) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Seksi

Teknik, Prasarana dan Pengujian Kendaraan;

13) Unit Pelaksana Teknis (Balai Uji Kendaraan Bermotor)

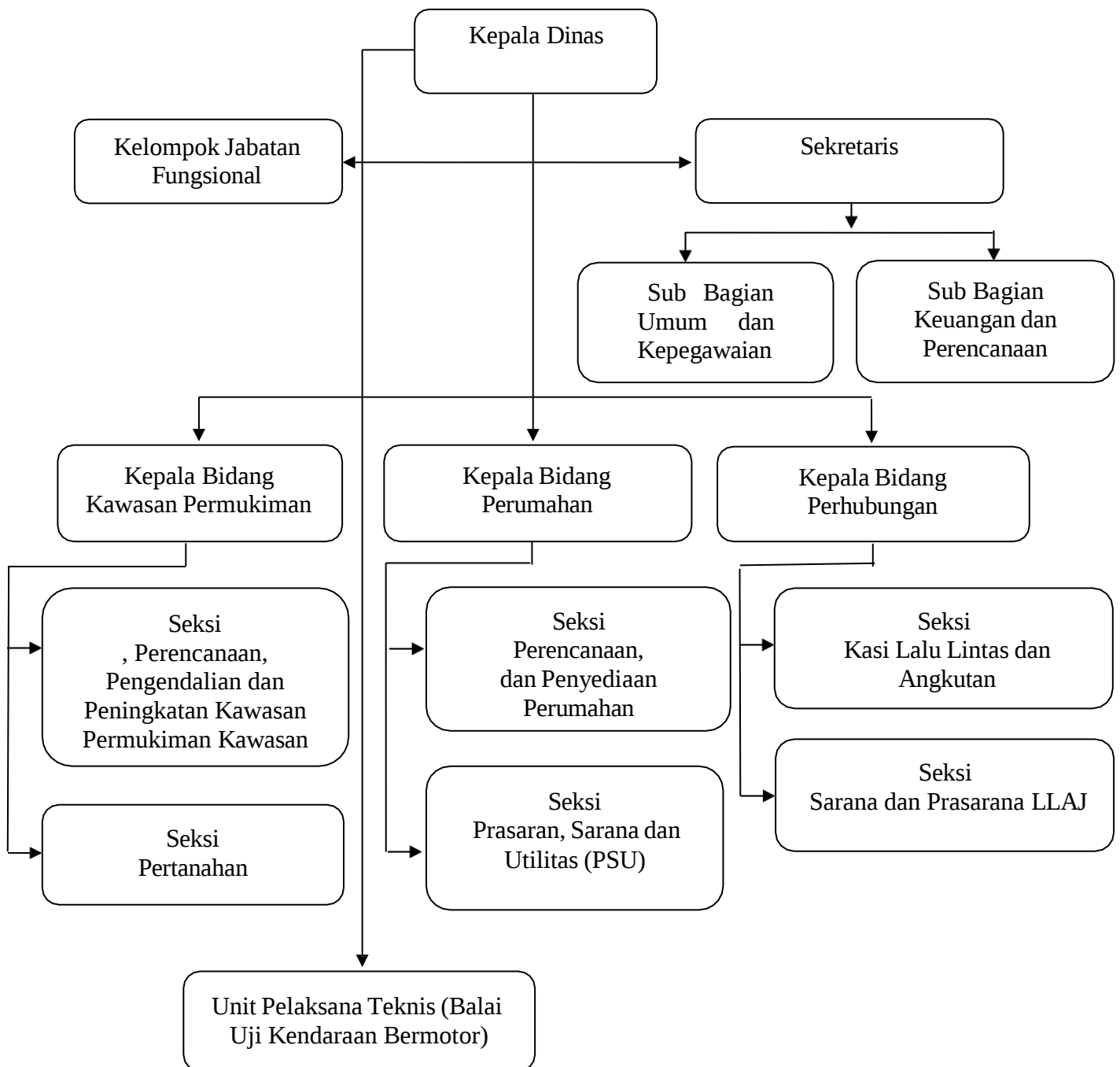
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan.

14) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023, Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki struktur yang terdiri dari :

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, dengan rincian Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tingkat 1	IV/B	0
3	Pembina	IV/A	1
4	Penata Tingkat I	III/D	8
5	Penata	III/C	4
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
7	Penata Muda	III/A	24
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/D	0
9	Pengatur	II/C	6
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	0
11	Pengatur Muda	II/A	17
12	Juru	I/A	0
13	PPPK	IX	3
14	PPPK	V	1
15	PPPK	III	1
TOTAL			68

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.1.2 dibawah ini:

Tabel 2.1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S 2)	3
2.	Strata 1 (S 1)	35
3.	Diploma 3 (D 3)	7
4.	SLTA / SMK	22

4.	SLTP	1
4.	SD	0
Jumlah		68

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 4 orang dengan proporsi sebesar 3 persen. Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 34 pegawai dengan persentase sebesar 52 Persen dari keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) 7 orang dengan persentase 10 persen dan SLTA/SMK berjumlah 20 orang dengan persentase 30 persen.

d. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.1. 3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	0
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	2
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	4

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Seluma. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma sampai dengan tahun 2025 ditunjukkan melalui Jumlah sarana dan prasarana serta infrastruktur yang telah dibangun di bidang masing-masing serta melibatkan partisipasi Masyarakat. Dokumen hasil pelaksanaan baik sarana dan prasarana serta infrastruktur, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten;

- b. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Selama dalam peningkatan kualitas produk Pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b. Kurangnya kapasitas SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
- c. Belum Maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- d. Belum Terlaksana sepenuhnya prosedur standar operasional Perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
- e. Kurangnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan.
- f. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana.
- g. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.
- h. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam pelaksanaan maupun penganggaran.
- i. Kurang lengkapnya data dasar OPD sebagai acuan perencanaan pembangunan

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional, Pelayanan dasar Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban Kab/kota bencana dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Pelayanan dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Pada Triwulan 3 tahun 2025 telah terealisasi sebesar 37,50%.

Berikut ini pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dirangkum dalam Tabel 2.1.4 (pencapaian Kinerja Perangkat Daerah) dan Tabel 2.1.5 (Anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah) sebagai berikut:

**Tabel 2.1. 4 pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah
dinas perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan
kabupaten seluma**

No	Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah																		
1	Capaian Evaluasi SAKIP				CC	CC	CC	CC	B	B	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%
	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman																		
2	Rasio Rumah Layak Huni				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2105	0,2093	0,2106	0,21	0,2093	105,25	104,65	105,30	105,00	104,65
3	Rasio Permukiman Layak Huni				1	1	1	1	1	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni				79	80	80,22	80,29	81,4	84,88	85,86	86,43	88,87	89,56	107,44	107,33	107,74	110,69	110,02
5	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau				20	25	30	35	40	25,58	28,59	37,07	41,39	45,05	127,90	114,36	123,57	118,26	112,63
6	persentase permukiman yang tertata				100	100	100	100	100	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60
7	persentase lingkungan permukiman kumuh				62,5	59	57	54	52	62,58	59,93	57,28	54,63	51,98	100,13	101,58	100,49	101,17	99,96
8	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				37,5	41	43	46	48	37,42	40,07	42,72	45,37	48,02	99,79	97,73	99,35	98,63	100,04
9	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan				60	50	45	35	30	58,70	45,11	35,33	33,70	25,54	97,83	90,22	78,51	96,29	85,13
10	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU				0	0	0	100	100	0	0	0	62,5	62,5	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
	Urusan Pertanahan																		
11	Persentase luas lahan bersertifikat				0	3,45	4,50	8,95	10,00	0	2,53	3,7	7,91	11,02	0	73,33	82,22	88,38	110,20
12	penyelesaian kasus tanah negara				0	0	0	90,00	100	0	0	0	80,00	100	0	0	0	88,89	100,00
13	penyelesaian izin lokasi				0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100,00	100,00
	Urusan Perhubungan																		
14	jumlah uji KIR angkutan umum				3000	3000	3803	3803	3803	1146	262	530	434	424	38,20	8,73	13,94	11,41	11,15
15	jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16	persentase layanan angkutan darat				25	25	25	25	25	38,20	8,73	13,94	11,41	11,15	152,80	34,93	55,75	45,65	44,60
17	persentase kepemilikan KIR angkutan umum				100	100	100	100	100	61,80	91,27	86,06	88,59	88,85	61,80	91,27	86,06	88,59	88,85
18	pemasangan rambu rambu				50	50	50	50	50	25,45	25,45	26,59	26,59	26,59	50,90	50,90	53,18	53,18	53,18
19	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan				0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 2.1. 5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024**

Belanja		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Pada Tahun ke-					pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realis asi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		Rp 13.144.700	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	Rp14.000.000		Rp 13.144.700	Rp 5.461.000	Rp -	Rp 9.812.500		100%	55%	0%	67,67%		
	Gaji dan tunjangan		Rp 1.940.442.118	Rp 2.112.058.150	Rp 2.291.536.227	Rp2.477.050.217		Rp 1.828.930.471	Rp 2.104.029.760	Rp 2.181.711.754	Rp 2.368.872.816		94%	99,62%	95%	95,63%		
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Rp 64.920.000	Rp 65.040.000	Rp 64.040.000	Rp67.000.000		Rp 60.330.000	Rp 65.040.000	Rp 64.040.000	Rp 62.680.000		93%	100%	100%	92,94%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Rp 5.534.000	Rp 6.600.000	Rp 6.840.000	Rp6.840.000		Rp 5.530.000	Rp 6.600.000	Rp -	Rp 4.800.000		100%	100%	0%	70,18%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Rp 12.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.992.410	Rp14.975.180		Rp 12.000.000	Rp 7.900.000	Rp 4.186.860	Rp 1.995.000		94%	88%	41,90%	13,32%		
	Penyediaan bahan logistik Kantor		Rp 27.980.500	Rp 22.089.750	Rp 26.738.800	Rp37.910.560		Rp 27.980.000	Rp 17.019.826	Rp 12.559.280	Rp 17.292.000		100%	77%	46,97%	45,61%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp 11.965.900	Rp 8.942.320	Rp 11.995.760	Rp15.592.580		Rp 11.965.000	Rp 8.383.150	Rp 11.995.760	Rp 15.300.500		100%	94%	100%	98,13%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp 19.897.000	Rp 11.000.288	Rp 11.000.000	Rp15.689.760		Rp 19.897.000	Rp 9.055.000	Rp 6.123.800	Rp 7.243.500		100%	82%	55,67%	46,17%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan		Rp 47.999.000	Rp 16.000.000	Rp 29.000.000	Rp29.000.000		Rp 47.993.800	Rp 15.150.000	Rp 18.080.000	Rp 16.960.000		100%	95%	62,34%	58,48%		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp 38.320.000	Rp 21.580.000	Rp 22.020.000	Rp30.000.000		Rp 38.320.000	Rp 17.699.000	Rp 14.976.000	Rp 24.750.000		100%	82%	68%	82,50%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 57.748.000	Rp 38.512.000	Rp 81.215.000	Rp90.379.000		Rp 57.524.600	Rp 14.023.257	Rp 55.392.884	Rp 57.304.584		100%	36%	68,21%	63,40%		
Program Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp 15.294.000	Rp 14.030.000	Rp 12.000.000	Rp12.000.000		Rp 15.294.000	Rp 9.420.000	Rp 3.500.000	Rp 5.750.000		100%	67%	29,17%	47,92%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Rp 74.617.072	Rp 60.617.072	Rp 56.500.000	Rp63.333.400		Rp 56.704.767	Rp 50.384.609	Rp 53.145.792	Rp 45.295.489		76%	83%	94%	71,52%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 34.760.000	Rp 5.559.400	Rp 9.000.000	Rp12.000.000		Rp 34.292.500	Rp 4.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.520.000		99%	72%	15%	12,67%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp 128.016.000	Rp 405.486.000	Rp 845.000.000	Rp612.000.000		Rp 104.900.000	Rp 398.599.800	Rp 635.314.500	Rp 604.025.000		82%	98%	75,19%	98,70%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan		Rp 150.723.500	Rp 121.013.060	Rp 289.854.050	Rp355.928.110		Rp 141.980.600	Rp 108.228.000	Rp 200.983.000	Rp 163.370.620		94%	89%	69,34%	45,90%		
Pengadaan barang milik daerah	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Rp 14.930.500		Rp 67.896.125			Rp 14.930.500		Rp 67.734.690			100%		99,76%	0%		
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				Rp 1.000.000					Rp -								
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 196.960.800	Rp 115.630.800	Rp 260.153.720	Rp573.125.320		Rp 154.668.860	Rp 89.159.000	Rp 191.551.000	Rp 473.225.000		79%	77%	73,63%	82,57%		

Belanja		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Pada Tahun ke-					pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realis asi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 92.141.700	Rp 67.661.710	Rp 113.499.980	Rp43.999.640		Rp 39.547.700	Rp 5.000.000	Rp 101.040.000	Rp 27.000.000		43%	7%	89%	61,36%		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			Rp 310.081.800	Rp 2.068.000.000	Rp295.064.000			Rp 262.500.000	Rp 956.511.300	Rp 286.107.360			85%	46,25%	96,96%		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Rp 19.635.000					Rp 9.585.000					49%			0%		
	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana tau relokasi program Kabupaten/Kota			Rp 9.572.100					Rp 8.452.650					88%				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 25.000.000	Rp 35.086.250	Rp 59.471.000	Rp44.871.730		Rp 25.000.000	Rp 32.100.000	Rp 7.505.000	Rp 1.382.000		100%	91%	12,62%	3,08%		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		Rp 488.216.000	Rp 80.074.750	Rp 966.079.200	Rp502.599.420		Rp 488.216.000	Rp 77.345.000	Rp 939.209.370	Rp 418.832.949		100%	97%	97,22%	83,33%		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		Rp 2.678.414.000	Rp 3.908.069.002		Rp250.000.000		Rp 2.678.414.000	Rp 829.200.000		Rp -		100%	21%		0%		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Rp 15.131.000	Rp 46.408.800	Rp126.327.250			Rp 14.455.000	Rp 23.924.300	Rp 14.345.000			96%	51,55%	11,36%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rp 31.850.000	Rp 15.000.000	Rp 999.670	Rp995		Rp 31.170.000	Rp 14.994.000	Rp -	Rp -		98%	100%	0%	0%		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp 250.000.000	Rp 343.962.945	Rp 90.123.990	Rp82.268.470		Rp 256.528.162	Rp 256.528.162	Rp 49.292.510	Rp 46.444.510		99%	75%	54,69%	56,45%		
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 1.389.220.400	Rp 69.664.999	Rp 182.990.400	Rp138.146.700		Rp 1.386.762.400	Rp 64.582.000	Rp 94.868.580	Rp 107.365.460		100%	93%	51,84%	77,72%		
	Pemeliharaan Sarana dan prasana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp 82.920.000	Rp 60.000.000	Rp 65.000.000	Rp34.000.000		Rp 75.920.000	Rp 60.000.000	Rp 64.965.650	Rp 24.000.000		92%	100%	99,95%	70,59%		
TOTAL			Rp 7.912.650.190	Rp 7.957.463.396	Rp 7.708.355.132	Rp5.944.102.332		Rp 7.637.530.060	Rp 4.555.309.214	Rp 5.759.962.030	Rp 4.805.674.288		92,00%	100,00%	99,95%	70,59%		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan, Kelompok sasaran adalah sekumpulan individu atau kelompok yang menjadi fokus utama dalam suatu program, proyek, atau kebijakan tertentu. Kelompok ini dipilih karena mereka memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang dilakukan.

Kelompok sasaran Dinas Perumahan kawasan Permukiman meliputi:

- a. Lingkungan dan lahan yang ada di seluruh Kabupaten Seluma
- b. Kelompok Masyarakat Miskin/Kurang Mampu di Kabupaten Seluma
- c. Permukiman Kumuh di Kabupaten Seluma
- d. Kawasan Terdampak Bencana di Kabupaten Seluma
- e. Lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan bermotor di Kabupaten Seluma
- f. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kabupaten Seluma
- g. Kawasan Perumahan dan Pertanahan di Kabupaten Seluma.
- h. Pengembang, asosiasi perumahan, dan pihak swasta yang bermitra dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan.
- i. Dst.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Permasalahan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Diketahui lima permasalahan utama di Kabupaten Seluma sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Belum optimalnya pembangunan ekonomi & pemerataan wilayah
- c. Masih tingginya permasalahan sosial, lemahnya pelestarian budaya, dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat

- d. Terjadinya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan disajikan dalam table 2.2.1 (Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah) sebagai berikut:

Tabel 2.2. 1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Seluma

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rumah Layak Huni	Rendahnya tingkat pemenuhan Rumah yang layak huni dan terjangkau	Terbatasnya lahan murah terjangkau MBR untuk pembangunan perumahan
			sistem pembiayaan pengembang perumahan yang masih tinggi dan rumit
			pengembang perumahan masih terpusat di wilayah perkotaan
			kurangnya komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
			masih tingginya jumlah RTLH belum tertangani
			masih tingginya rumah tumbuh kategori RTLH
2	Permukiman kumuh perkotaan	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan	belum terintegrasinya pembangunan prasarana dan sarana di wilayah permukiman kumuh
3	lingkungan sehat yang di dukung PSU	kurangnya komitmen pembangunan PSU oleh pihak pengembang perumahan	belum terpenuhinya target rumah terbangun di lokasi perumahan pengembang
			lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial di lokasi perumahan pengembang
			belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan
4	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aturan dan kesadaran dalam berlalulintas	kurangnya sumber daya manusia yang membidangi LLAJ
			Banyaknya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan
			Perilaku pengendara yang tidak disiplin
			masih kurangnya infrastruktur yang memadai
			sudah tidak layakanya kendaraan beroperasi di jalan raya
5	Sarana dan Prasarana Angkutan	keterbatasan Kualitas infrastruktur jalan hingga ketersediaan dan kualitas armada angkutan	Kurangnya fasilitas penunjang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
			Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas
			Kurangnya kebijakan yang tepat untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana Angkutan Jalan
			Kurangnya jaringan jalan yang memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Pengujian Berkala Kendaraan B	kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Kurangnya SDM yang membidangi pengujian berkala kendaraan Bermotor
			masih minimnya pemahaman masyarakat akan teknologi baru yang diterapkan dalam pelayanan uji Kuer
			Masih kurangnya fasilitas kelengkapan dan aplikasi alat Pengujian yang terus berkembang
7	Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah kabupaten seluma	Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten seluma dalam memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah	Dokumen kepemilikan yang kurang memadai untuk memenuhi syarat permohonan sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah kabupaten seluma
			Terbatasnya alokasi anggaran untuk fasilitasi sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah kabupaten seluma
			Terbatasnya alokasi anggaran untuk melakukan indentifikasi dan inventarisasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma
			Kurangnya SDM untuk melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah kabupaten seluma
			Sengketa tanah aset pemerintah kabupaten seluma dengan masyarakat yang dapat menghambat proses sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah kabupaten seluma
			Kurangnya tingkat kesadaran dan dukungan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten seluma untuk mengajukan permohonan sertifikasi hak atas tanah aset pemerintah kabupaten seluma yang dikelolanya
8	Penyelesaian kasus tanah negara	Kurangnya data yang akurat dari instansi atau lembaga yang berwenang	Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah untuk penyelesaian kasus tanah negara
			Kurangnya koordinasi dari instansi atau lembaga terkait untuk penyelesaian kasus tanah negara
			Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan dan pemilikan tanah negara
			Terbatasnya alokasi anggaran untuk fasilitasi penyelesaian kasus tanah negara
9	Penyelesaian izin lokasi	Ketidakjelasan regulasi terhadap kewenangan instansi terkait penyelesaian izin lokasi	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait terhadap penyelesaian izin lokasi
			Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi terhadap kewenangan penyelesaian izin lokasi
			Kurangnya sosialisasi perubahan terhadap nomenklatur penyelesaian izin lokasi
			Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang disebabkan dengan kurangnya SDM
			Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengelolaan dan penatagunaan tanah

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

a. Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis

1) Isu Global

Risiko global jangka menengah mencerminkan tantangan kompleks yang saling terkait dan berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Dinamika global yang terus berubah, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi, menuntut kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan stabilitas global. Untuk menghadapi risiko global yang mungkin terjadi, diperlukan kolaborasi lintas negara, sektor, dan kebijakan yang adaptif agar ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat terjaga di masa depan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu global dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

a) Cuaca Ekstrem

Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan gelombang panas yang mengancam kehidupan manusia serta infrastruktur.

b) Perubahan Kritis terhadap Ekosistem

Perubahan drastis dalam ekosistem akibat deforestasi, pengasaman laut, dan degradasi lahan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati.

c) Biodiversity loss dan Gangguan Ekosistem

Kepunahan spesies, degradasi habitat, dan ketidakseimbangan rantai makanan yang berakibat pada kerusakan ekosistem secara luas.

d) Krisis Sumber Daya Alam

Krisis air bersih, kelangkaan bahan baku industri, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

e) Misinformasi dan Disinformasi

Penyebaran berita palsu, manipulasi informasi, dan propaganda digital yang mengancam stabilitas politik dan kepercayaan publik.

f) Dampak Buruk Teknologi Berbasis AI

Penyalahgunaan AI dalam deepfake, penyebaran konten hoaks, pengangguran akibat otomatisasi, serta bias algoritma yang dapat memperkuat ketidaksetaraan.

g) Involuntary Migration

Perpindahan paksa akibat konflik, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang buruk yang dapat menyebabkan krisis kemanusiaan dan ketegangan antarnegara.

h) Cyber Insecurity

Ancaman serangan siber, pencurian data pribadi, peningkatan kejahatan dunia maya, serta risiko keamanan digital bagi individu dan lembaga.

i) Polarisasi Sosial

Meningkatnya perpecahan di masyarakat akibat polarisasi politik, konflik identitas, dan intoleransi sosial yang diperburuk oleh media sosial.

j) Polusi

Peningkatan emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, sampah plastik di lautan, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan.

2) Isu Nasional

Wilayah Sumatra memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi ekonomi yang besar didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim global, serta sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, industri bio-based, dan pariwisata. Namun, dalam upaya mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Sumatra masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis wilayah Sumatera dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

a) Isu Transformasi Sosial.

b) Isu Transformasi Ekonomi.

c) Isu Transformasi Sosial.

d) Isu Perubahan Iklim dan Krisis Ekologis.

e) Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.

3) Isu Regional

Isu strategis pembangunan Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa data
- b) Isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045
- c) Kebijakan dalam RTRW
- d) Kebijakan dalam RPJMN serta RPJMD Provinsi Bengkulu
- e) Isu-isu Global dan pembangunan yang sedang berkembang

Visi, misi, serta janji kerja Bupati dan Wakil Bupati juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Seluma 2025-2029. Sebanyak 33 isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 dikelompokkan ke dalam lima kelompok isu utama, yaitu Isu Sumber Daya Manusia, Isu Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Isu Tata Kelola Pemerintahan, Isu Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Isu Lingkungan Berkelanjutan, dan “Isu Kota Penyanggah Ibu Kota”. 33 isu strategis ini menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Seluma.

a) Isu Sumber Daya Manusia

- Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan
- Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
- Isu Penguatan Kesenjangan Gender
- Isu Pemuda dan Olahraga

b) Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

- Isu Kemiskinan
- Isu Penguatan Ketahanan Pangan
- Isu Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian
- Isu Penguatan UMKM, IKM, Koperasi dan BUMDes yang Berdaya Saing
- Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Isu Ketahanan Energi
- Isu Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- Isu Perbaikan Infrastruktur Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan
- Isu Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Isu Desa Mandiri
 - Isu Peningkatan Daya Tarik Wisata
- c) Isu Tata Kelola Pemerintahan
- Isu Efisiensi Anggaran dan Realokasi Pembiayaan
 - Isu Penurunan PAD; atau Isu Ketergantungan Dana Transfer Daerah;
 - Isu Kemandirian Daerah
 - Isu Supremasi Hukum
 - Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Transformatif
 - Isu Peningkatan Profesionalitas dan Kompetensi ASN
- d) Isu Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
- Isu Realisasi PMKS
 - Isu Keamanan dan Ketentraman
 - Isu Penguatan Akhlak dan Budaya
- e) Lingkungan yang Berkelanjutan
- Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman
 - Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Isu Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir yang Ramah Lingkungan
- f) Isu Kabupaten Seluma Sebagai Kota Penyanggah (OPSIONAL)
- Isu Fasilitas Pariwisata
 - Isu Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah
 - Isu Penyediaan infrastruktur dasar (Transportasi, Kesehatan, dan Pendidikan)
 - Isu Penataan Ruang Terencana
 - Isu Pembentukan Mekanisme Kerja Sama antara Pemerintah Daerah

b. Potensi Daerah

1) Tantangan

Ketersediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Seluma yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
- b) Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidangnya.
- c) Belum lengkapnya basis data elektronik untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
- d) Minimnya fasilitas penunjang kinerja pelayanan kantor.
- e) Pengendalian kawasan permukiman di wilayah rawan bencana belum optimal sehingga pengembangan kawasan Permukiman di wilayah rawan bencana khususnya bencana banjir, rob (Air Pasang) dan tsunami tidak terkendali. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya rumah masyarakat yang rawan terhadap bencana,
- f) Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi,
- g) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap bahaya berada di wilayah rawan bencana.
- h) Rendahnya sumber daya manusia dan kepedulian masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan.
- i) Globalisasi yang cenderung mempengaruhi secara langsung terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- j) Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
- k) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2) Potensi

Potensi/ peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

- a) Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di manfaatkan secara maksimal.
- b) Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan.
- c) Tersebarnya lingkungan pemukiman penduduk.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor.
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap tuntutan pembangunan Daerah (Tingkat swadaya yang semakin tinggi).
- f) Kemajuan Dan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat menunjang dalam menyusun produk-produk perencanaan.
- g) Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan IPTEK yang Berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

Dari Faktor faktor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa Faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, adalah:

- a) Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang perencanaan
- b) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan pegawai baru yang dibutuhkan.
- c) Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional.
- d) Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik.
- e) Peningkatan ketersediaan data pembangunan yang Sistematis, Akurat dan Akuntabel
- f) Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah.
- g) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- h) Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT).
- i) Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya.
- j) Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini, optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang perencanaan.
- k) Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah.

Tabel 2. 1 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di manfaatkan secara maksimal	Permasalahan pembangunan & pemerataan dan daya saing ekonomi		1. Cuaca Ekstrem (Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan gelombang panas yang mengancam kehidupan manusia serta infrastruktur) 2. Krisis Sumber Daya Alam	Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.	Isu Kabupaten Seluma Sebagai Kota Penyanggah	1. Isu Penyediaan infrastruktur dasar 2. Isu Perbaikan Infrastruktur Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan
Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan	Permasalahan sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan				Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Isu Kemiskinan 2. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman
Tersebar nya lingkungan pemukiman penduduk	Permasalahan kondisi lingkungan yang berkelanjutan				Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2029, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman jangka menengah Kabupaten Seluma, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Seluma secara keseluruhan.

Tujuan yang ditetapkan mengacu pada misi kesatu, kedua dan keempat Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu **“Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan”**.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Tahun 2025-2029

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- a. Meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas layanan publik.
- b. Terpenuhinya kebutuhan WNI akan rumah layak huni..
- c. Terfasilitasinya PSU perumahan.
- d. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain.
- e. Meningkatkan kejelasan hak milik tanah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Seluma beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 (Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Seluma) sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Seluma

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.2.15.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan											
- Menjamin Perlindungan Sosial	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	45,05	45,57	46,09	46,6	47,12	47,64	48,16	
		meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas layanan publik	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	80	80	80	80	80	80	85	
		terpenuhinya kebutuhan akan rumah yang layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	89,56	89,66	89,76	89,86	89,95	90,05	90,15	
			Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	10,44	10,34	10,24	10,14	10,05	9,95	9,85	
			Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	48,02	50,67	53,32	55,97	58,62	61,27	62,50	
		Terfasilitasinya PSU perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	62,5	87,5	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain	Persentase penduduk terlayani transportasi umum ((%))	11,15	7,89	11,83	14,46	17,09	19,72	21,42	
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (Unit)	424	450	550	650	750	850	900	
			Jumlah pelabuhan penyeberangan (unit)	1	1	1	1	1	1	1	
			Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	88,85	92,11	88,17	85,54	82,91	80,28	79,03	
			Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	26,59	39,31	52,04	64,74	77,48	90,20	94,32	
			V/C ratio di jalan Provinsi (Nilai)	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	
		Meningkatnya Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Persentase)	0	10	18	18	18	18	18	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	10	18	18	18	18	18	
			Persentase Informasi Petanahan yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	20	16	16	16	16	16	
			Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	10	18	18	18	18	18	
			Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	10	18	18	18	18	18	18	
			Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	10	18	18	18	18	18	18	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase)	10	18	18	18	18	18	18	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langka yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus dan efektif dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan arah kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan memiliki keterpaduan serta dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan dinamika pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja yang sistematis dalam menyelesaikan tantangan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis yang dihadapi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi wujud konkret dari strategi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dilihat pada tabel 3.4 (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah) sebagai berikut

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman: a. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk: • Menciptakan rumah yang layak huni; • mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan • meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. b. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: • kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; • keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan • ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.	1.Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang dengan arah kebijakan meliputi: - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha; - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat - Peningkatan Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - memberikan kemudahan akses bagi MBR terhadap perumahan layak huni melalui berbagai program dan kebijakan. - meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau 2.Strategi peningkatan infrastuktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dengan arah kebijakan meliputi; - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	

			Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian b. Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 3. Strategi Peningkatan kejelasan hak milik atas tanah dengan arah kebijakan meliputi: a. Menyediakan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee b. Penyediaan Informasi Petanahan yang Dimanfaatkan c. Penyelesaian Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi d. Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan e. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	
2.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		1. Strategi dalam Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain meliputi arah kebijakan: a. Cakupan Penduduk terlayani transportasi umum b. Meningkatnya Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan c. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota d. Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program.

Rencana program dan kegiatan strategis mengacu pada arah Kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Seluma. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Untuk menindak lanjuti sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Seluma di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menetapkan beberapa program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- b. Program Pengembangan Perumahan,
- c. Program Kawasan Permukiman,
- d. Pogram Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- f. Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan;
- g. Program Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- h. Program Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- i. Program Pengelolaan Tanah Kosong,
- j. Program Penatagunaan Tanah
- k. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Metode program, kegiatan, indikator dan pagu indikatif, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan yang harus di laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebagaimana Tabel 4.1 (Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma) sebagi berikut:

Tabel 4. 1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.098.026.861,00		6.920.782.500,ss00		6.933.875.659,00		6.946.627.904,00		6.958.961.132,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.316.834.331,00		6.139.437.127,00		6.152.376.694,00		6.164.974.593,00		6.177.152.720,00	
Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	69,86	70,3	70,74	7.316.834.331,00	71,18	6.139.437.127,00	71,62	6.152.376.694,00	72,62	6.164.974.593,00	72,5	6.177.152.720,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					25.160.030,00		25.283.314,00		25.407.202,00		25.531.698,00		25.656.803,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	25.160.030,00	100	25.283.314,00	100	25.407.202,00	100	25.531.698,00	100	25.656.803,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	0	0				0				0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					6.032.500,00		6.062.059,00		6.091.763,00		6.121.613,00		6.151.609,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	48,02	50,67	53,32	6.032.500,00	55,97	6.062.059,00	58,62	6.091.763,00	61,27	6.121.613,00	63,92	6.151.609,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	48,02	50,67	53,32		55,97		58,62		61,27		61,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	6,24	0,94	0,95		0,96		0,97		0,98		0,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	89,56	89,66	89,76	450.000.000,00	89,86	450.000.000,00	89,95	450.000.000,00	90,05	450.000.000,00	90,15	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,	62,50	87,50	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)													Dan Kawasan Permukiman
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					560.040.120,00		560.040.120,00		660.040.120,00		660.040.120,00		660.040.120,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00	
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	15	13	13	505.040.120,00	13	505.040.120,00	13	505.040.120,00	17	505.040.120,00	17	505.040.120,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
tersedianya tanah lokasi pembangunan aset pmda	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	2	3	25.000.000,00	4	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TANAH KOSONG														
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	15	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	12	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	0	0	0	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0	0	0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan		
												Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan		
TOTAL KESELURUHAN					8.913.066.981.00		7.735.822.620.00		7.848.915.779.00		7.861.668.024.00		7.874.001.252.00	

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan dirumuskan berdasarkan Program telah ditetapkan. Setiap kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk menindak lanjuti sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Seluma di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menetapkan beberapa poin kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam Tabel 4.2 (Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Rancangan Akhir renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)

**Tabel 4. 2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.15.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan							
- Menjamin Perlindungan Sosial	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		
		meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas layanan publik			Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)		
			Nilai Akip Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Uurusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Unit)	Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		terpenuhinya kebutuhan akan rumah yang layak huni			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)		
					Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
				Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
				Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
					Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Berkurangnya Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Terfasilitasinya PSU perumahan			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)		
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain			Persentase penduduk terlayani transportasi umum ((%))		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (Unit)		
					Jumlah pelabuhan penyeberangan (unit)		
					Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)		
					Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)		
					V/C ratio di jalan Provinsi (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah Peralatan dan Aplikasi SIM BLUe fullcycle	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	2.15.02.2.06.0008 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Ditetapkan Persetujuan Dokumen Teknis ANDALALIN	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07.0008 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kejelasan Hak Milik Atas Tanah			Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Persentase)		
					Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)		
					Persentase Informasi Petanahan yang Dimanfaatkan (Persentase)		
					Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)		
					Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)		
					Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)		
					Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase)		
					Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah Garapan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			tersedianya tanah lokasi pembangunan aset pemda		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Terselesaikannya Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.15.2.10.05.0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor							
- Menjamin Perlindungan Sosial	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		
		meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas layanan publik			Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)		
		Nilai Akip Perangkat Daerah				1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu			Persentase penduduk terlayani transportasi umum ((%))		
					Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (Unit)		
					Jumlah pelabuhan penyeberangan (unit)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		dengan moda transportasi lain			Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)		
					Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)		
					V/C ratio di jalan Provinsi (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat					

4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Setiap perangkat daerah bertanggung jawab dalam mengelola program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, baik dalam urusan pemerintahan wajib maupun pilihan. Program ini mencakup berbagai sektor, termasuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta sektor ekonomi dan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Seluma. Dalam pelaksanaannya, program-program ini harus disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan daerah. Dari sisi pendanaan, program perangkat daerah di Kabupaten Seluma didukung oleh berbagai sumber anggaran, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber lain yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam RPJMD Kabupaten Seluma, alokasi anggaran untuk program perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Seluma mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan, baik di pusat pemerintahan maupun di kecamatan dan desa.

Metode program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target dan hasil pagu indikatif, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan, subkegiatan yang harus di laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebagaimana Tabel 4.3 (Rencana program/kegiatan/subkegiatan Rancangan Akhir renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan) sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8.098.026.861,00		6.920.782.500,00		6.933.875.659,00		6.946.627.904,00		6.958.961.132,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.316.834.331,00		6.139.437.127,00		6.152.376.694,00		6.164.974.593,00		6.177.152.720,00		
Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	69,86	70,74	7.316.834.331,00	71,18	6.139.437.127,00	71,62	6.152.376.694,00	72,62	6.164.974.593,00	72,5	6.177.152.720,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.024.500,00		5.049.120,00		5.073.861,00		5.098.723,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, pengangan, dan terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2	5.000.000,00	2	5.024.500,00	2	5.049.120,00	2	5.073.861,00	2	5.098.723,00		
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.024.500,00		5.049.120,00		5.073.861,00		5.098.723,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	2	2	5.000.000,00	2	5.024.500,00	2	5.049.120,00	2	5.073.861,00	2	5.098.723,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)													
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.568.315.092,00		5.568.315.092,00		5.568.315.092,00		5.568.315.092,00		5.568.315.092,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	5.568.315.092,00	12	5.568.315.092,00	12	5.568.315.092,00	12	5.568.315.092,00	12	5.568.315.092,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	65		65		65		65		65			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.487.295.088,00		5.487.295.088,00		5.487.295.088,00		5.487.295.088,00		5.487.295.088,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	65	5.487.295.088,00	65	5.487.295.088,00	65	5.487.295.088,00	65	5.487.295.088,00	65	5.487.295.088,00		
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				81.020.004,00		81.020.004,00		81.020.004,00		81.020.004,00		81.020.004,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	81.020.004,00	12	81.020.004,00	12	81.020.004,00	12	81.020.004,00	12	81.020.004,00		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.880.000,00		2.880.000,00		2.880.000,00		2.880.000,00		2.880.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.880.000,00		2.880.000,00		2.880.000,00		2.880.000,00		2.880.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00	12	2.880.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.000,00		502.450,00		504.912,00		507.386,00		509.872,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	250.000,00	1	252.450,00	1	254.912,00	1	257.386,00	1	259.872,00		
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				250.000,00		252.450,00		254.912,00		257.386,00		259.872,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	250.000,00	1	252.450,00	1	254.912,00	1	257.386,00	1	259.872,00		
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				81.645.254,00		81.974.479,00		92.629.337,00		102.931.329,00		112.802.299,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	81.645.254,00	12	81.974.479,00	12	92.629.337,00	12	102.931.329,00	12	112.802.299,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.676.045,00		2.689.158,00		2.702.334,00		2.715.576,00		2.728.882,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.676.045,00	1	2.689.158,00	1	2.702.334,00	1	2.715.576,00	1	2.728.882,00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.971.909,00		4.996.271,00		5.202.753,00		5.045.354,00		5.070.077,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.971.909,00	1	4.996.271,00	1	5.202.753,00	1	5.045.354,00	1	5.070.077,00		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.795.885,00		7.834.085,00		7.872.472,00		7.991.047,00		7.494.811,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	7.795.885,00	2	7.834.085,00	2	7.872.472,00	2	7.991.047,00	2	7.494.811,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.499.875,00		12.561.124,00		12.622.674,00		12.684.525,00		12.746.679,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12.499.875,00	12	12.561.124,00	12	12.622.674,00	12	12.684.525,00	12	12.746.679,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.999.940,00		5.024.440,00		5.049.059,00		5.073.800,00		5.098.661,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.999.940,00	1	5.024.440,00	1	5.049.059,00	1	5.073.800,00	1	5.098.661,00		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14.720.000,00		14.721.292,00		14.864.609,00		14.937.446,00		15.010.639,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	14.720.000,00	12	14.721.292,00	12	14.864.609,00	12	14.937.446,00	12	15.010.639,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.996.000,00		10.044.980,00		10.094.201,00		10.143.662,00		10.193.366,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	9.996.000,00	12	10.044.980,00	12	10.094.201,00	12	10.143.662,00	12	10.193.366,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.985.600,00		24.103.129,00		34.221.235,00		44.339.919,00		54.459.184,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	23.985.600,00	12	24.103.129,00	12	34.221.235,00	12	44.339.919,00	12	54.459.184,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.200.525.370,00		527.944,00		530.531,00		533.131,00		535.743,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Uuruan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1.200.525.370,00	0	527.944,00	0	530.531,00	0	533.131,00	0	535.743,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1	1				1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Unit)													
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				525.370,00		527.944,00		530.531,00		533.131,00		535.743,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	525.370,00	1	527.944,00	1	530.531,00	1	533.131,00	1	535.743,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.000.000,00		385.881.600,00		387.772.419,00		389.672.504,00		391.581.900,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	384.000.000,00	12	385.881.600,00	12	387.772.419,00	12	389.672.504,00	12	391.581.900,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000,00		3.617.640,00		3.635.366,00		3.653.180,00		3.671.080,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.600.000,00	12	3.617.640,00	12	3.635.366,00	12	3.653.180,00	12	3.671.080,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				61.200.000,00		61.499.880,00		61.801.229,00		62.104.055,00		62.408.365,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	61.200.000,00	12	61.499.880,00	12	61.801.229,00	12	62.104.055,00	12	62.408.365,00		
1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.200.000,00		7.235.280,00		7.270.733,00		7.306.359,00		7.342.161,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.200.000,00	12	7.235.280,00	12	7.270.733,00	12	7.306.359,00	12	7.342.161,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				312.000.000,00		313.528.800,00		315.065.091,00		316.608.910,00		318.160.294,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	312.000.000,00	12	313.528.800,00	12	315.065.091,00	12	316.608.910,00	12	318.160.294,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.220.950,00		84.535.633,00		84.851.857,00		85.169.631,00		85.488.963,00		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	64.220.950,00	15	84.535.633,00	15	84.851.857,00	15	85.169.631,00	15	85.488.963,00		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.220.950,00		84.535.633,00		84.851.857,00		85.169.631,00		85.488.963,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	64.220.950,00	15	84.535.633,00	15	84.851.857,00	15	85.169.631,00	15	85.488.963,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lapangan	(Unit)													
Nilai Akip Perangkat Daerah				7.316.834.331,00		6.139.437.127,00		6.152.376.694,00		6.164.974.593,00		6.177.152.720,00	1.04.2.15.2.10.05 .0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.947.665,00		4.971.909,00		4.996.271,00		5.020.753,00		5.045.354,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.947.665,00	1	4.971.909,00	1	4.996.271,00	1	5.020.753,00	1	5.045.354,00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.947.665,00		4.971.909,00		4.996.271,00		5.020.753,00		5.045.354,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.947.665,00	1	4.971.909,00	1	4.996.271,00	1	5.020.753,00	1	5.045.354,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.800.000,00		4.823.520,00		4.847.155,00		4.870.906,00		4.894.774,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.800.000,00	12	4.823.520,00	12	4.847.155,00	12	4.870.906,00	12	4.894.774,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.800.000,00		4.823.520,00		4.847.155,00		4.870.906,00		4.894.774,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.800.000,00	12	4.823.520,00	12	4.847.155,00	12	4.870.906,00	12	4.894.774,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				25.160.030,00		25.283.314,00		25.407.202,00		25.531.698,00		25.656.803,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	25.160.030,00	100	25.283.314,00	100	25.407.202,00	100	25.531.698,00	100	25.656.803,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	0		0		0		0		0			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau				21.160.030,00		21.283.314,00		21.407.202,00		21.531.698,00		21.656.803,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Relokasi Program Kabupaten/Kota														
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	2	1	21.160.030,00	1	21.283.314,00	1	21.407.202,00	1	21.531.698,00	1	21.656.803,00		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				21.160.030,00		21.283.314,00		21.407.202,00		21.531.698,00		21.656.803,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	2	1	21.160.030,00	1	21.283.314,00	1	21.407.202,00	1	21.531.698,00	1	21.656.803,00		
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.032.500,00		6.062.059,00		6.091.763,00		6.121.613,00		6.151.609,00		
Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	48,02	53,32	6.032.500,00	55,97	6.062.059,00	58,62	6.091.763,00	61,27	6.121.613,00	63,92	6.151.609,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	6,24	0,95		0,96		0,97		0,98		0,99			
	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	48,02	53,32		55,97		58,62		61,27		61,37			
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5.032.500,00		5.062.059,00		5.091.763,00		5.121.613,00		5.151.609,00		
Tersusun/Tereview/T erlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/T erlegalisasi (Dokumen)	1	1	5.032.500,00	1	5.062.059,00	1	5.091.763,00	1	5.121.613,00	1	5.151.609,00		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				5.032.500,00		5.062.059,00		5.091.763,00		5.121.613,00		5.151.609,00		
Tersusun/Tereview/T erlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/T erlegalisasi (Dokumen)	1	1	5.032.500,00	1	5.062.059,00	1	5.091.763,00	1	5.121.613,00	1	5.151.609,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	476	486	1.000.000,00	491	1.000.000,00	496	1.000.000,00	501	1.000.000,00	506	1.000.000,00		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	476	486	1.000.000,00	491	1.000.000,00	496	1.000.000,00	501	1.000.000,00	506	1.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	89,56	89,76	450.000.000,00	89,86	450.000.000,00	89,95	450.000.000,00	90,05	450.000.000,00	90,15	450.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	90,29	90,53				90,71				90,90			
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Berkurangnya Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15	15				15				15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00		
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	62,50	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	20	20		20		20		20		20			
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	20	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				560.040.120,00		560.040.120,00		660.040.120,00		660.040.120,00		660.040.120,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah Garapan	Persentase Terelesaiakannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	15	13	505.040.120,00	13	505.040.120,00	13	505.040.120,00	17	505.040.120,00	17	505.040.120,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		
Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	15	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00		
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		505.040.120,00		
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	15	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00	30	505.040.120,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
tersedianya tanah lokasi pembangunan aset pemda	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselesaikannya Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	3	25.000.000,00	4	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)													
2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	12	20.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2.10.08.2.01 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.10.08.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	0	1				1				1			
2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	0	0	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1.04.2.15.2.10.05 .0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0	0		0		0		0		0			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk	0	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				105.300.000,00		105.300.000,00		105.300.000,00		105.300.000,00		105.300.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	15	15	105.300.000,00	15	105.300.000,00	15	105.300.000,00	15	105.300.000,00	15	105.300.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	50	50				50				50			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	50	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	15	15	5.300.000,00	15	5.300.000,00	15	5.300.000,00	15	5.300.000,00	15	5.300.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)													
2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Jumlah Peralatan dan Aplikasi SIM BLUe fullcycle	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1				1		1					
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	424	450				450		450					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	424	450	5.000.000,00	450	5.000.000,00	450	5.000.000,00	450	5.000.000,00	450	5.000.000,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)													
	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	0	1		1		1		1					
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		
2.15.02.2.06.0008 - Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00		
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Ditetapkan Persetujuan Dokumen Teknis ANDALALIN	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	0	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		
2.15.02.2.07.0008 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	0	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat				0		0		0		0		0	1.04.2.15.2.10.05 .0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.

Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan yang ditetapkan, maka disusun prioritas, sasaran, program dan kegiatan. Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih dipertajam, yang pencapaiannya diukur melalui sasaran-sasaran yang diperinci melalui indikator beserta targetnya. Adapun program adalah bingkai dari langkah-langkah riil berupa rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang terlampir di tabel 4.4 (daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Rancangan Akhir renstra pemerintah kabupaten seluma).

Tabel 4. 4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.15.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				
1.	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus	
3.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
4.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
5.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
6.	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah Garapan	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	tersedianya tanah lokasi pembangunan aset pemda	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
8.	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
9.	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	2.10.08.2.01 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
			2.10.08.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
			2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
			2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong	
10.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini tabel 4.5 (Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD) sebagai berikut :

Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.2.15.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan									
2.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	89,56	89,66	89,76	89,86	89,95	90,05	90,15	
3.	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
4.	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	(%)	11,15	7,89	11,83	14,46	17,09	19,72	21,42	
5.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	62,5	87,5	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	80	80	80	80	80	80	85	
7.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
8.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,44	10,34	10,24	10,14	10,05	9,95	9,85	
9.	Persentase Informasi Petanahan yang Dimanfaatkan	Persentase	0	20	16	16	16	16	16	
10.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	48,02	50,67	53,32	55,97	58,62	61,27	62,50	
11.	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
12.	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	10	18	18	18	18	18	18	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
13.	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	26,59	39,31	52,04	64,74	77,48	90,20	94,32	
14.	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase	10	18	18	18	18	18	18	
15.	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	10	18	18	18	18	18	18	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah Kabupaten Seluma, yang dilaksanakan oleh unit kerja/ satuan kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, disamping indikator kinerja juga sasaran yang telah ditetapkan memuat informasi tentang Program Kerja, Kegiatan kebijakan dan rencana capaian kinerjanya.

Berikut ini indikator kinerja kunci yang tertuang dalam tabel 4.6 (Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Seluma).

**Tabel 4. 6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	positif	(%)	89,56	89,66	89,76	89,86	89,95	90,05	90,15	
3.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		%	62,5	87,5	100	100	100	100	100	
4.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)		%	10,44	10,34	10,24	10,14	10,05	9,95	9,85	
5.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani		%	48,02	50,67	53,32	55,97	58,62	61,27	62,50	
6.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
8.	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah		Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
9.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Persentase	0	10	18	18	18	18	18	
10.	Persentase Informasi Petanahan yang Dimanfaatkan		Persentase	0	20	16	16	16	16	16	
11.	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui		Persentase	0	10	18	18	18	18	18	

	Mediasi										
12.	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah		Persentase	10	18	18	18	18	18	18	
13.	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan		Persentase	10	18	18	18	18	18	18	
14.	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu		Persentase	10	18	18	18	18	18	18	
15.	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola		Persentase	0	15	17	17	15	15	12	
16.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
17.	Persentase penduduk terlayani transportasi umum		(%)	11,15	7,89	11,83	14,46	17,09	19,72	21,42	
18.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan		Unit	424	450	550	650	750	850	900	
19.	Jumlah pelabuhan penyeberangan		unit	1	1	1	1	1	1	1	
20.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota		Persentase	88,85	92,11	88,17	85,54	82,91	80,28	79,03	
21.	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota		Persentase	26,59	39,31	52,04	64,74	77,48	90,20	94,32	
22.	V/C ratio di jalan Provinsi		Nilai	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	
23.	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B		Unit	0	0	0	1	1	1	1	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini dapat mendukung visi **“SELUMA EMAS BERLIAN”**.

Rancangan Akhir Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan selama kurun waktu lima tahun.

Rancangan Akhir Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelaksanaan Pelayanan kepada Stakeholder.

Terwujudnya pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Seluma yang Terarah, Terpadu, Komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan Revitalisasi Lembaga Pelaksanaan Pembangunan Daerah guna mendukung keberadaan Disperkim yang Profesional.
2. Terjalinnnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi serta Partisipasi Aktif dari seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Strategis sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terutama pada akhir periode Rancangan Akhir Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Rancangan Akhir Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana Pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir

periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma dalam menjalankan Tugas dan Fungsi guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang Profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Rancangan Akhir Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan di Kabupaten Seluma.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma 2025-2029 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma berkewajiban untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma 2025-2029 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut Visi, Misi dan Agenda serta berbagai Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan secara Terukur, Terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan Rencana Tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Seluma.

Kepala Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman, dan
Perhubungan Kab. Seluma



ERLAN SUADI, SP., M.AP
NIP. 1971111 9 200604 1 010